

Pancasila dan demokrasi di indonesia: meneguhkan pancasila sebagai penopang demokrasi di era globalisasi

Siska Dwiyanti

Program Studi Manajemen, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 25050110084@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila; Demokrasi;
Globalisasi; Revitalisasi Nilai;
Literasi Digital

Keyword

Pancasila; Democracy;
Globalization; Value
Revitalization; Digital Literacy

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memiliki peran penting dalam membentuk karakter demokrasi Indonesia yang berkeadaban dan berkepribadian nasional. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang kompleks, seperti degradasi moral, meningkatnya intoleransi sosial, serta melemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat dan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tinjauan pustaka

(literature review) untuk mengkaji peran Pancasila dalam memperkuat sistem demokrasi di era global. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila harus direvitalisasi agar tidak hanya menjadi doktrin normatif, tetapi juga menjadi pedoman praksis dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Revitalisasi nilai Pancasila dapat dilakukan melalui penguatan keadilan sosial dalam ekonomi digital, pembentukan kepemimpinan inklusif di kalangan generasi muda, serta integrasi pendidikan karakter dan literasi digital dalam sistem pendidikan nasional. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut, Pancasila dapat meneguhkan demokrasi Indonesia agar tetap berkeadilan, inklusif, dan relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dinamis.

ABSTRACT

Pancasila, as Indonesia's national ideology, plays a crucial role in shaping a civilized and identity-based democratic system. However, globalization and the rapid growth of digital technology have brought complex challenges to its implementation, including moral degradation, rising social intolerance, and the weakening of national value internalization among citizens and younger generations. This study employs a qualitative descriptive approach with a literature review method to examine Pancasila's role in strengthening democracy within the global era. The findings indicate that Pancasila must be revitalized to move beyond its symbolic function and serve as a practical foundation for political, social, and economic life. Revitalization can be achieved through promoting social justice in the digital economy, developing inclusive leadership among the youth, and integrating character education and digital literacy into the national education framework. Strengthening these values will reaffirm Pancasila as the moral foundation of Indonesian democracy, ensuring that it remains just, inclusive, and responsive to the challenges of globalization while preserving the nation's ethical and cultural identity.

Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjiwai seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai falsafah hidup, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga landasan moral yang menjaga arah demokrasi agar tetap



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berakar pada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Menurut Dwi Adityo (2022) Pancasila juga merupakan prinsip dasar dimana didalamnya terkandung kualitas tertentu, harapan dan cita-cita yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk kemudian diwujudkan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan. Namun, dalam arus globalisasi yang diwarnai kemajuan teknologi, perubahan nilai, dan keterbukaan informasi, eksistensi Pancasila menghadapi tantangan serius. Demokrasi Indonesia, yang seharusnya menegakkan prinsip kerakyatan dan musyawarah, kini dihadapkan pada disorientasi moral, krisis etika publik, serta pengaruh ideologi luar yang berpotensi menggerus jati diri bangsa.

Kemajuan teknologi di era Society 5.0 membawa dampak ambivalen. Menurut Badira Kamelin (2023) dalam *Maliki Interdisciplinary Journal*, integrasi antara kehidupan manusia dan teknologi digital telah memudahkan aktivitas sosial, tetapi juga menyebabkan kemerosotan nilai. Masyarakat semakin sering melupakan norma Pancasila ketika berinteraksi di ruang digital terlihat dari maraknya ujaran kebencian, polarisasi politik, dan penyebaran hoaks yang mencederai etika publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi tanpa landasan moral Pancasila akan kehilangan arah dan berubah menjadi kebebasan tanpa tanggung jawab. Hal serupa ditegaskan Nazwa Primayditha dkk. (2024) bahwa literasi digital menjadi kunci membentuk pribadi berkarakter Pancasila. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap etika bermedia mengakibatkan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang publik, padahal demokrasi menuntut kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Dalam kerangka Pancasila, kebebasan harus dijalankan dengan kesantunan, menghormati martabat sesama, serta berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain tantangan digital, kehidupan demokrasi Indonesia juga diwarnai meningkatnya intoleransi sosial dan krisis moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dini Febriana Sofi (2025) menyebutkan bahwa intoleransi yang muncul di masyarakat merupakan bukti melemahnya pemahaman terhadap sila pertama dan ketiga Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Sementara itu, Silvia Salsa Bella dkk. (2025) menilai bahwa korupsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi inti Pancasila. Kedua fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya berakar pada nilai moral bangsa, melainkan masih didominasi kepentingan pragmatis. Pancasila seharusnya menjadi penopang utama sistem demokrasi Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya memuat prinsip yang relevan dengan demokrasi modern: penghormatan terhadap hak asasi manusia, musyawarah, keadilan sosial, serta tanggung jawab kolektif. Nadia Nilnal Muna dan Achmad Musyafiq (2024) menekankan pentingnya etika bermedia sosial berdasarkan nilai Pancasila agar ruang publik digital menjadi tempat yang sehat bagi partisipasi demokratis. Begitu pula Abyannabil Abdillah dan Muhammad Hanif Firdaus (2025) menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi

digital dapat mendorong demokrasi ekonomi yang adil dan inklusif, bukan hanya berorientasi pada keuntungan individu.

Namun, tantangan terbesar saat ini terletak pada generasi muda yang hidup dalam budaya global dan teknologi instan. Zuhhar Raihan Noor dan Muhammad Rizqi Firdaus (2025) menegaskan bahwa generasi Z perlu dibekali pemahaman mendalam tentang Pancasila agar mampu menjadi pelaku demokrasi yang beretika, kritis, dan inklusif. Tanpa internalisasi nilai-nilai kebangsaan, demokrasi hanya akan menjadi formalitas politik tanpa kedalaman moral. Dengan demikian, di era globalisasi yang sarat dengan perubahan nilai, Pancasila harus kembali diteguhkan sebagai penopang utama demokrasi Indonesia. Penguatan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar upaya ideologis, tetapi merupakan kebutuhan praktis untuk menjaga stabilitas sosial, integritas politik, dan karakter bangsa. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila akan mampu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab, hak individu dengan kepentingan bersama, serta kemajuan global dengan jati diri nasional. Oleh sebab itu, revitalisasi nilai Pancasila menjadi keharusan agar demokrasi Indonesia tetap berkeadaban dan berkepribadian di tengah derasnya arus globalisasi.

Pembahasan

Krisis Nilai dan Degradasi Etika Publik di Era Globalisasi

Arus globalisasi yang kian deras membawa dampak besar terhadap perubahan perilaku dan orientasi nilai masyarakat Indonesia. Menurut Anti Putri, Pratiwi dan Hidayatullah (2025) Globalisasi juga memaparkan masyarakat Indonesia pada beragam ideologi dan nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan media sosial mempercepat proses demokratisasi, namun di sisi lain memunculkan krisis moral yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila. Fenomena penyebaran ujaran kebencian, hoaks, hingga polarisasi politik menunjukkan terjadinya pergeseran makna kebebasan dalam berdemokrasi. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab kini sering kali digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memperkuat segregasi sosial.

Menurut Badira Kamelin (2023) dalam Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), era Society 5.0 telah mengubah orientasi perilaku masyarakat yang cenderung individualistik dan konsumtif. Masyarakat tidak lagi menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral, tetapi mengikuti tren global yang pragmatis dan instan. Akibatnya, demokrasi kehilangan arah etis karena dijalankan tanpa landasan spiritual dan kemanusiaan. Padahal, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan individu dan kolektif. Krisis nilai ini juga berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi politik. Sebagaimana dikemukakan Nazwa Primayditha dkk. (2024), rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat ruang publik digital mudah terjebak dalam polarisasi ideologis.

Informasi yang tidak terverifikasi dan propaganda politik kerap menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Dalam konteks ini, lemahnya pemahaman terhadap sila kedua dan keempat Pancasila yang menekankan kemanusiaan beradab serta hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan menjadi akar persoalan utama. Demokrasi tanpa etika akan menghasilkan partisipasi yang destruktif dan memecah belah.

Demokrasi dan Tantangan Intoleransi Sosial

Selain pergeseran nilai, tantangan lain yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah meningkatnya intoleransi sosial. Dini Febriana Sofi (2025) menegaskan bahwa banyak kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis agama di masyarakat muncul akibat rendahnya pemahaman terhadap sila pertama dan ketiga Pancasila. Konflik antarumat beragama, ujaran kebencian, serta perilaku eksklusif mencederai semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi keutuhan bangsa. Intoleransi yang berkembang di masyarakat digital memperburuk situasi, karena isu-isu agama dan politik kerap dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Fenomena intoleransi ini menimbulkan efek domino yang mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Media sosial sering kali digunakan untuk menyebarkan narasi permusuhan atas nama agama, sebagaimana dicatat oleh Nadia Nilnal Muna dan Achmad Musyafiq (2024). Platform digital yang semestinya menjadi ruang dialog berubah menjadi arena polarisasi dan provokasi. Ujaran kebencian tidak hanya melukai nilai kemanusiaan, tetapi juga mempersempit ruang bagi musyawarah publik yang sehat. Ketika masyarakat lebih mudah menolak perbedaan daripada berdialog, maka demokrasi kehilangan substansinya (Faslah, 2024).

Intoleransi juga bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu, sedangkan sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Melemahnya dua nilai tersebut mengindikasikan bahwa Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran sosial. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi juga memperburuk keadaan, karena menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap nilai kebangsaan dapat ditoleransi. Dalam konteks demokrasi, ketidaktegasan hukum ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap negara.

Pancasila sebagai Penopang Moral Demokrasi

Demokrasi Indonesia sejatinya tidak identik dengan demokrasi liberal Barat. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai subjek politik yang berlandaskan moral, spiritual, dan sosial. Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman agar demokrasi dijalankan dengan keadaban dan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Silvia Salsa Bella dkk. (2025) menyoroti bahwa maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan bukti nyata lemahnya penghayatan terhadap nilai Pancasila dalam praktik politik. Ketika elite politik mengabaikan prinsip keadilan sosial dan

kemanusiaan beradab, maka demokrasi hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi tanpa Pancasila akan kehilangan arah moral. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” mengajarkan bahwa keputusan politik harus diambil dengan musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan dominasi mayoritas. Demikian pula sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menjadi pengingat bahwa demokrasi harus menghadirkan pemerataan, bukan kesenjangan. Nilai-nilai ini jika diabaikan akan menjadikan demokrasi hanya formalitas tanpa substansi moral dan sosial.

Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

Menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi digital, Pancasila perlu direvitalisasi agar tetap relevan dalam kehidupan demokratis kontemporer. Transformasi digital telah mengubah sistem komunikasi, ekonomi, serta dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia. Di satu sisi, teknologi menghadirkan kemudahan dan keterbukaan, tetapi di sisi lain menimbulkan pergeseran nilai yang berpotensi melemahkan moralitas publik dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kemajuan digital tidak menjauhkan masyarakat dari identitas dan nilai luhur bangsa.

1) Penguatan Nilai Keadilan Sosial dalam Ekonomi Digital

Menurut Abyannabil Abdillah dan Muhammad Hanif Firdaus (2025), penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem ekonomi digital mampu memperkuat prinsip keadilan sosial dan solidaritas kebangsaan. Ekonomi digital yang tumbuh pesat sering kali menimbulkan kesenjangan baru antara mereka yang memiliki akses teknologi dengan yang tertinggal secara digital. Prinsip sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” memberikan arah bahwa transformasi ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Pemerataan akses digital, etika bisnis berbasis kemanusiaan, dan kolaborasi antarsektor menjadi wujud konkret penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi modern. Dengan menempatkan aspek kemanusiaan di atas kepentingan profit semata, digitalisasi dapat berfungsi sebagai sarana demokratisasi ekonomi yang membuka peluang bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

2) Pembentukan Kepemimpinan Inklusif di Kalangan Generasi Muda

Selain dalam aspek ekonomi, revitalisasi nilai Pancasila juga penting dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Zuhhar Raihan Noor dan Muhammad Rizqi Firdaus (2025) menegaskan bahwa generasi digital merupakan pilar utama demokrasi masa depan, namun mereka rentan terhadap pengaruh globalisasi yang menumbuhkan sikap individualistik dan apatis. Pancasila harus

menjadi fondasi moral dalam membentuk kepemimpinan yang inklusif, empatik, dan berintegritas. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan hikmat kebijaksanaan harus diinternalisasikan melalui pendidikan formal, organisasi kepemudaan, serta ruang digital yang produktif. Kepemimpinan berbasis Pancasila akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beradab dalam menghadapi perbedaan serta bijak dalam menggunakan kebebasan demokratis.

3) Implementasi Praksis Nilai Pancasila melalui Pendidikan dan Literasi Digital

Revitalisasi nilai Pancasila juga memerlukan langkah nyata dalam ranah pendidikan dan literasi masyarakat. Eka Dyah Vitaloka (2025) menekankan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai doktrin ideologis, tetapi harus dihidupkan melalui praktik sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis karakter menjadi kunci dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, menghargai keberagaman, dan berperilaku etis di ruang publik digital. Literasi digital yang berlandaskan nilai Pancasila berfungsi sebagai benteng moral terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta provokasi yang dapat mengancam harmoni sosial. Dalam konteks ini, budaya gotong royong dapat diadaptasi ke dalam bentuk kolaborasi digital seperti gerakan sosial daring, komunitas edukatif, dan inovasi berbasis solidaritas nasional yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Secara keseluruhan, revitalisasi nilai Pancasila di era digital harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan publik yang berlandaskan etika kebangsaan, lembaga pendidikan berfungsi sebagai agen penanaman nilai, dan masyarakat sipil menjadi pelaku utama dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan nyata. Hanya dengan cara demikian, demokrasi Indonesia akan tetap berkeadaban, inklusif, dan berkepribadian di tengah derasnya arus globalisasi.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam menopang sistem demokrasi Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital yang semakin cepat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan pedoman moral yang menjaga arah kehidupan berbangsa agar tidak kehilangan jati diri. Dalam konteks demokrasi modern, Pancasila berfungsi sebagai pengendali agar kebebasan yang dijamin oleh demokrasi tetap dijalankan dalam bingkai tanggung jawab sosial dan keadaban publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia di era globalisasi meliputi krisis nilai moral, meningkatnya intoleransi sosial, serta lemahnya internalisasi Pancasila di kalangan masyarakat. Perubahan sosial akibat

kemajuan teknologi dan arus informasi global membawa dampak terhadap menurunnya pemahaman masyarakat terhadap makna substansial Pancasila. Oleh sebab itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar ideologi bangsa tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan dalam perilaku nyata di berbagai bidang kehidupan.

Revitalisasi Pancasila dapat dilakukan melalui penguatan keadilan sosial di sektor ekonomi digital, pembentukan kepemimpinan inklusif di kalangan generasi muda, serta implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan literasi digital. Upaya ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila harus menjadi prioritas utama agar generasi muda memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sosial di tengah pengaruh budaya global yang semakin kompleks. Selain itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan publik dan praktik sosial untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem hukum, pemerintahan, dan media sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan, partisipasi publik yang etis, serta penggunaan teknologi yang bertanggung jawab merupakan bentuk konkret dari penerapan demokrasi berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga menjadi kekuatan hidup yang menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan pendidikan berbasis nilai Pancasila sejak jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pembelajaran karakter, etika digital, serta toleransi dalam kurikulum secara sistematis. Masyarakat dan media massa juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarkan konten positif yang memperkuat semangat persatuan dan keadilan sosial. Selain itu, penguatan literasi digital berbasis Pancasila menjadi strategi penting untuk membangun ruang publik yang sehat dan demokratis. Penggunaan media sosial hendaknya diarahkan pada kegiatan edukatif, kolaboratif, serta pemberdayaan masyarakat. Generasi muda, sebagai pengguna utama teknologi digital, perlu menjadi pelopor dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan mengaktualisasikan Pancasila secara konsisten di era globalisasi, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, inklusif, dan berkepribadian. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kompas moral yang harus terus dijaga dan diperbarui agar tetap menjadi penuntun bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

Daftar Pustaka

Abdillah, A., & Firdaus, M. H. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem ekonomi digital: Studi kasus start-up Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*

- (MIJ), 3(2), 630–641. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/13162/5604/>
- Adityo, R. D. (2022). PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN PANCASILA PADA MAHASISWA. *DEVOSI*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Afwadzi, B. (2024, December). The Pancasila Student Profile: Insights from Islamic Religious Education Perspectives. In *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* (Vol. 9, No. 1, pp. 96-105). <https://repository.uin-malang.ac.id/22880/>
- Anti Putri, V. F., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Bella, S. S., Kholidiyah, A. S., Romadhoni, R., Azkiyah, A. Q., & Arobi, M. L. (2025). Tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan moderasi beragama. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(3), 531–536. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/13431>
- Faslah, R. (2024). Identitas nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup. ISBN 978-623-519-890-3. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Febriana Sofi, D. (2025). Menggali nilai Pancasila dalam menyikapi kasus intoleransi di masyarakat. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(4), 304–313. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14629/4366>
- Kamelin, B. (2023). Implementasi nilai Pancasila dan Islam pada kegiatan bersosial media masyarakat Indonesia di era Society 5.0. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(4), 278–286. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4311>.
- Muna, N. N., & Musyafiq, A. (2024). Etika bermedia sosial dan penyebaran informasi: Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membimbing penggunaan media sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(2), 229–233. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/6405>
- Noor, Z. R., & Firdaus, M. R. (2025). Memperkuat kepemimpinan inklusif pada Gen Z di era digitalisasi melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(2), 433–442. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/12636/4439/>
- Primayditha, N., Devi, R., & Adhiyya, S. F. (2024). Pentingnya literasi digital dalam membangun pribadi yang berkarakter Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(1), 28–35. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14670/5004/>
- Vitaloka, E. D. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(3), 574–579. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/citationstylelanguage/get/acm-sig-proceedings?submissionId=6345>